

Makalah Pembahasan

Pendekatan *Integrated Coastal Zone and River Basin Management (ICARM)* untuk Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto⁶

TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU

Wilayah sensitif dan terkena tekanan ekologis dan ekonomis :

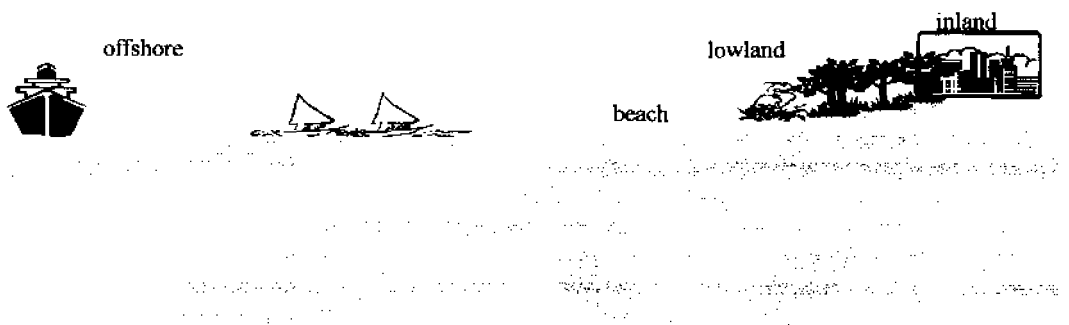
- kerusakan habitat
- pencemaran perairan
- eksploitasi berlebih sumberdaya perikanan
- permasalahan sosial ekonomi dan budaya

Perlu pendekatan terpadu : **Integrated Coastal Zone and River Basin Management (ICARM)**

Konsep **Integrated Coastal Zone and River Basin Management (ICARM)** dalam pengelolaan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu

- Pemasalahan lingkungan bersumber tidak hanya di wilayah pesisir, namun berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Teluk Jakarta merupakan akumulasi dari masukan bahan pencemar yang masuk dari 13 muara sungai: DAS ciliwung, Cisadane dan Citarum
- Mengintegrasikan pengelolaan kawasan DAS dengan kawasan pesisir dan laut karena merupakan satu kesatuan (saling terkait)

ICARM



Gambar 1. Konsep *Integrated Coastal Zone and River Basin Management (ICARM)*

⁶ Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB

KEPULAUAN SERIBU : GUGUSAN PULAU-PULAU KECIL

physical
smallness

population
homogeneity

small
population

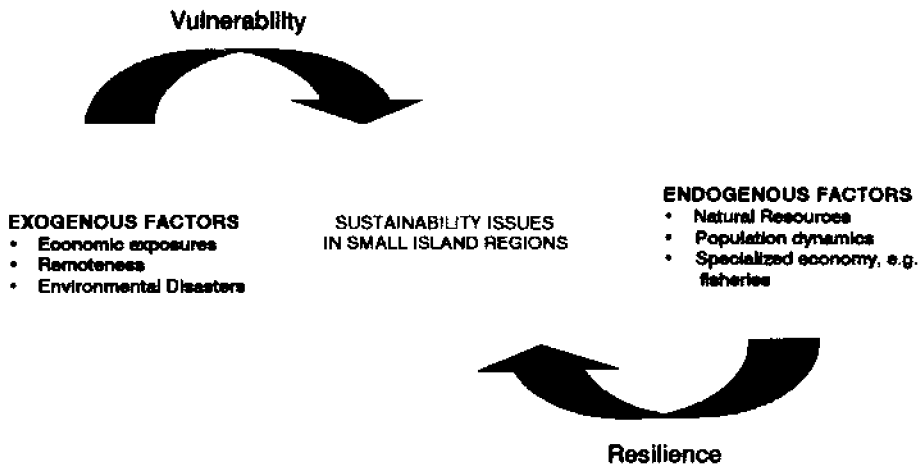


specific
social
characteristics

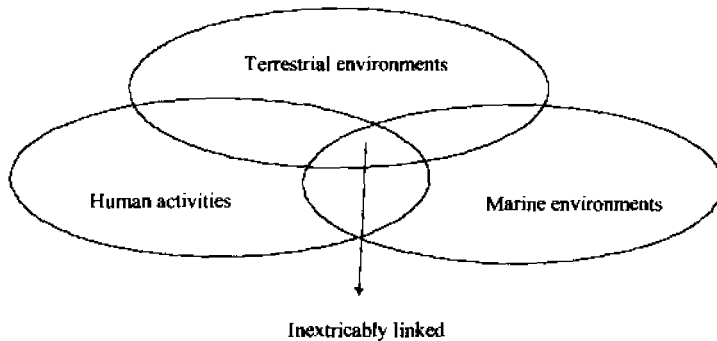
economic and
environmental
disadvantages

relatively
abundant
of marine resources

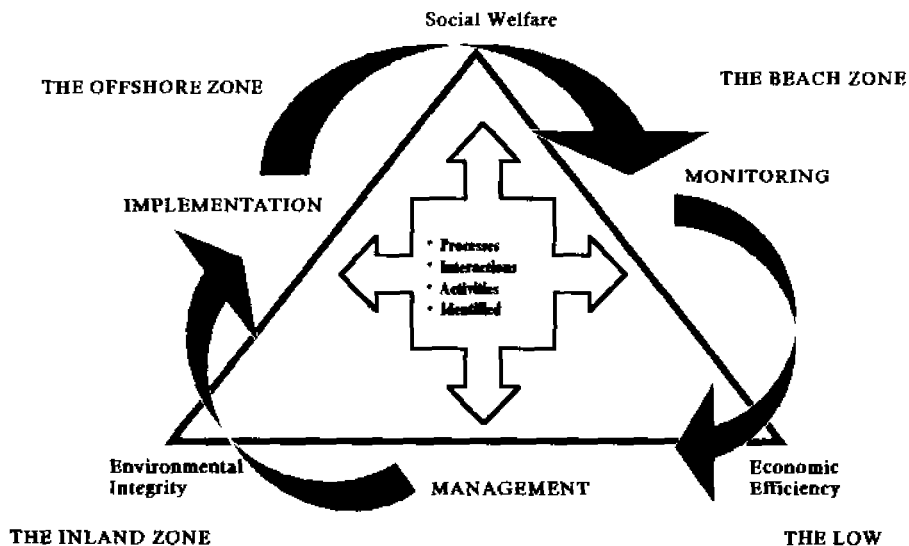
PENTINGNYA PULAU KECIL



KONSEPSI PENGELOLAAN PESISIR, DAS DAN PPK SECARA TERPADU



Keterkaitan antar Komponen Dalam Sistem Pesisir



The Integrated Small Island Sustainability (Debanco, 1999)

PERMASALAHAN DI KAWASAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU

- Kerusakan habitat: perubahan bentang lahan, perubahan garis pantai, konversi habitat alami menjadi non-alami, reklamasi pantai
- Pencemaran perairan: penurunan kualitas air dan kematian massal biota perairan (2 kali di 2004)
- Permasalahan sosial ekonomi dan budaya yang terkait dengan kerusakan habitat dan pencemaran
- Kecenderungan eksploitasi berlebih sumberdaya perikanan

PENDEKATAN PEMECAHAN PERMASALAHAN

Pendekatan Ekosistem

- Melakukan upaya restorasi habitat alami: mangrove, lamun dan terumbu karang
- Melakukan upaya reduksi tingkat pencemaran, melalui pengurangan input bahan pencemar: instalasi pengolah limbah industri dan domestik
- Melakukan monitoring terhadap kualitas lingkungan Teluk Jakarta
- Upaya *stock enhancement* melalui proses restocking (jangka panjang)

Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Contoh : melalui pengembangan sistem *sea farming* di Kepulauan Seribu.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
- Memasyarakatkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan diikuti dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui pengembangan mata pencaharian alternatif.
- Pengelolaan wilayah pesisir seyogyanya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, disesuaikan dengan kearifan-kearifan yang ada di masyarakat, kebutuhan dan kemampuan masyarakat pesisir.

Pendekatan Sosial Politik

- Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak lain. Artinya bahwa pihak perencana harus bebas menentukan arah pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder.
- Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan ekonomis.
- Proses penyusunan perencanaan pembangunan wilayah pesisir hendaknya dilakukan dalam dua arah, yaitu perencanaan yang bersifat 'bottom up' dan perencanaan yang bersifat 'top down'.
- Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir juga harus diikuti pendidikan politik bagi seluruh pelaku pembangunan di wilayah pesisir, untuk menciptakan kesamaan pandangan terhadap wilayah pesisir.

Pendekatan Hukum dan Kelembagaan

- Hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan DAS serta pulau-pulau kecil secara terpadu merupakan unsur penunjang penting.
- Melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang kuat, sistem pengelolaan pesisir terpadu akan dapat lebih mudah dilaksanakan.
- Sebagai contoh, implementasi konsep *fishing right* dalam *sea farming* di Kepulauan Seribu memerlukan dukungan perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pengelolaan wilayah pesisir, DAS dan pulau-pulau kecil.